









*down efect*” terhadap pembangunan. Berangkat dari asumsi dan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan suatu masyarakat yang demokratis antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan saling mengisi satu dengan yang lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi juga menjadi dinamis.<sup>2</sup>

Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang berbeda. *kedua*, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender. *ketiga*, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh. *keempat*, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan. *kelima*, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen. *keenam*, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri. Dan *ketujuh*, kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan,

---

<sup>2</sup> Tilaar, HAR. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi: Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*. (Jakarta: Gramedia, 1997). 23.





paradigma modernisasi, yang difokuskan pada inisiatif pengembangan teknologi, dengan maksud meringankan beban kerja perempuan (Yulia Cleves Mosse, 2007: 205). Dari berbagai peninjauan terhadap konsep WID, ternyata paradigma modernisasi yang diusung dari konsep ini, justru semakin memarginalkan kaum perempuan.

*WAD (Women And Development)*. Pendekatan ini berasumsi bahwa posisi perempuan akan menjadi lebih baik selama struktur internasional menjadi lebih adil. Konsep ini merupakan koreksi terhadap sistem perekonomian internasional, perubahan struktur internasional, dan pengurangan ketergantungan negara ketiga. Pendekatan ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khususnya perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki. Pendekatan ini cenderung dilakukan dengan menitikberatkan pada kegiatan yang mendatangkan pendapatan perempuan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang di sumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

*GAD (Gender And Development)*, Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat perempuan sebagai subyek pembangunan, agen perubahan dengan menitikberatkan pada pola hubungan yang setara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini, lebih bersifat bottom up, sehingga pengalaman dan pemahaman yang berasal dari perempuan menjadi entry point dari proses

pembangunan. Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dalam wujud persamaan hak, kedudukan, kemampuan, peranan, kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang kehidupan menjadi modal utama adanya kesetaraan gender, sehingga baik jenis maupun imbalan kerja akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan secara proporsional. Hal ini sejalan dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979 yang telah menyetujui tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

#### **D. Kebijakan Responsif Gender Dalam Pembangunan**

Kebijakan Pemerintah mengenai penerapan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional, berawal dari kesadaran adanya ideologi gender dan pergeseran paradigma untuk menyusun perubahan struktural relasi gender, maka GAD menjadi strategi dan pendekatan dalam Pembangunan Nasional. Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dimulailah pengarusutamaan gender/ PUG (*gender mainstreaming*) (*Ministry of Women's Empowerment Republic of Indonesia, 2002*), yang merupakan: “pendekatan untuk mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah perempuan maupun laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program dalam bidang



dapat bersikap proaktif dalam mengambil prakarsa agar kebijakan pembangunan daerah betul-betul mempertimbangkan laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, kontrol, partisipasi serta manfaat dari seluruh investasi pembangunan di masing-masing daerah. Kondisi dinamis dimana laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan peran, hak, tanggung jawab, kesempatan, posisi yang sama dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan agar memberikan pengaruh nyata bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dimana, Visi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan yaitu “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini akan berdampak positif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, terlebih utama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Sehingga diharapkan dapat memiliki replikasi tinggi bukan hanya berdampak pada pembangunan keluarga yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

#### **E. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan adalah gerakan yang dimaksud untuk memberi kemungkinan menjadi yang terbaik untuk perempuan, karena adanya potensi diri yang memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Gerakan ini muncul disebabkan oleh ketidakberdayaan (*powerless*) kaum perempuan











